

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, A, dan Muhdar, Z.A. 2004, *Qaamus Krabyak, Al-Ashrii, Arabbi-Induuniisii*, cetakan ke-9, Multi Karya Grafika, Yogyakarta.
- Anderson L.T, dan Micchesney, S.F, 2003, *Property Rights: Cooperation, Conflict, and Law* (eds), Princeton University Press, New Jersey.
- Appeldoorn, v.J.L 1981, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. Ke-18, Pradnya Paramitha, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1990, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan 32, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Atmoredjo, S 2016, *Ideologi Hukum Indonesia, Kajian tentang Pancasila dalam Perspektif Ilmu Hukum dan Dasar Negara*, Lingkar Media. Yogyakarta.
- Arba, M.H. 2015, *Hukum Agraria Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Attamimi, S.H.A, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan, Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta.
- Bakri, M, 2007, *Hak Menguasai Tanah oleh Negara: Paradigma Baru untuk Reformasi Agraria*, Citra Media, Jakarta.
- Barnes,R, 2009, *Property Rights and Natural Resources*, Hart Publishing, Oxford and Portland, Oregon.
- Basri, S, 2011, *Pengantar Ilmu Politik*, Indie Book Corner, Yogyakarta.
- Bromley W.D. dan Cernea, M.M 1989, *The Management of Common Property Natural Resources: Some Conceptual and Operational Fallacies*, World Bank, Washington DC.
- Browder, L.O, Roger A.Jr., Cunningham dan Smith, F.A, 1984, *Basic Property Law*, Four Edition, West Publishing Co., St. Paul.
- Bruggink, J.J.H,1996, *Refleksi tentang Hukum*, Dialihbahasakan oleh Arief Sidharta, PT Aditya Bakti, Bandung.
- Cahaya S, Chairijah, Cahaya S, 2014, *Teori-Teori Hukum*, Yayasan Gema Yustisia, Jakarta.
- Caporaso A.J dan Levine, P.D, 1992, *Theories of Political Economy*, Cambridge University Press, USA.

- Creswell, W.J. 1993, *Research Design: Qualitative & Quantitative Approach*, Sage, London.
- Curzon, B.L, 1991, *Land Law*, Fifth Edition, Longman Group UK Ltd., Great Britain.
- Curzon, B.L,1991, *Land Law*, Fifth Edition, Pitman Publishing, Singapore.
- Dalimunthe, C, 2000, *Pelaksanaan Landreform di Indonesia dan Permasalahannya*, FH USU Press, Medan.
- Dewata, N.M.F, dan Achmad, Y, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Dirdjosisworo, S, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Erwiningsih, W, 2009, *Hak Menguasai Negara Atas Tanah*, Total Media, Yogyakarta.
- Furubotn, E. dan Richter, R, 2000, *Institutions and Economic Theory: The Contribution of the New Institutional Economics*, The University of Michigan Press, Ann Arbor, USA.
- Gautama, S, 1981, *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria*, Alumni, Bandung.
- Handoko, W. 2014, *Kebijakan Hukum Pertanahan (Sebuah Refleksi Keadilan Hukum Progresif)*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Harsono, B, 1999, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2000, *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah*, Djambatan, Jakarta.
- \_\_\_\_\_,2007, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional: Perkembangan Pemikiran dan Hasilnya Sampai Menjelang Kelahiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*, Badan Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2008, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Badan Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, B, 2016, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Badan Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta.

- Hartono, S, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung.
- Harwood, M, 1975, *Land Law*, Sweet & Maxwell Limited, London.
- Hasni, 2016, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah dalam Konteks Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria-UUPR-UUPLH*, Edisi Ketiga, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Iver, M.M.R.1947, *The Web of Government: Jaring Pemerintahan*, Terjemahan Harun Al Rasjid dan Sutresna Sastradidjaja, Cetakan I, Yasaguna, Jakarta
- Koentjaraningrat 1997, *Metode-metode Penelitian Masyarakat/Redaksi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Luthfi, N.A, 2011, *Melacak Sejarah Pemikiran Agrarian, Sumbangan Pemikiran Madzhab Bogor*, STPN, Pustaka Ifada, dan SAINS, Yogyakarta.
- Kasper W danStreit, E.M, 1998, *Instituonal Economics: Social Order and Public Policy*, Edward Elgar, USA.
- Macpherson, B.C, 1972, *The Political Theory of Possessive Individualism*, Clarendon Press, Oxford.
- \_\_\_\_\_,1989, *Property: Mainstream and Critical Positions: Pemikiran Dasar tentang Hak Milik*, Cetakan Pertama, Terjemahan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta.
- Mahfud M. M.D, 2006, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Cetakan Pertama, LP3ES, Jakarta.
- Mardalis, 2003, *Metode Penelitian Kualitatif (Suatu Pendekatan Proposal)*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Marzuki, M.P, 2014, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Mertokusumo, S, 1996, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2009, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Badan Penerbit Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2018, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

- Modeong, S. 2004, *Teknik Perundang-undangan di Indonesia*, Perca, Jakarta.
- Muchsin, Koeswahyono, I dan Soimin, 2010, *Hukum Agraria Indonesia dalam Perspektif Sejarah*, Refika Aditama, Bandung.
- Muhammad, B, 2003, *Asas-asas Hukum Adat, Suatu Pengantar*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Muntaqo, F, 2010, *Karakter Kebijakan Hukum Pertanahan Era Orde Baru dan Era Reformasi*, Badan Penerbit Undip, Semarang.
- Neuman, L.W, 2003, *Social Research Methods: Qualitative & Quantitative Approach*, Sage, London.
- Notonegoro, 1984, *Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.
- Noor, A, 2006, *Konsep Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia Ditinjau dari Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung.
- Nugroho, H, 2002, *Reformasi Politik Agraria Mewujudkan Pemberdayaan Hak-hak atas Tanah*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- Olin L. Browder, Jr., Roger A. Cunningham dan Allan F. Smith, 1984, *Basic Property Law*, Four Edition, West Publishing Co., St. Paul.
- Parlindungan, P.A, 1990, *Berakhirnya Hak-hak Atas Tanah (Menurut Sistem UUPA)*, Mandar Maju, Bandung.
- Paton L.W, 1969, *Text Books Jurisprudence*, Oxford University Press, Oxford.
- Pejovich, S. 1995, *S Economic Analysis of Institutions and Systems*, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, The Netherlands.
- Perangin, E, 1994, *Hukum Agraria Indonesia, Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Raja Grafindo Persada.
- Purbacaraka, P dan Soekanto, S, 1989, *Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Cet. ke-3, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Praptodihardjo,S, 1953, *Sendi-sendi Hukum Tanah di Indonesia*, Yayasan Pembangunan, Jakarta.
- Raharjo, S, 2009, *Lapisan-lapisan dalam Studi Hukum*, Bayumedia, Malang.
- Rahardjo, S, 1991, *Ilmu Hukum*, Gramedia, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2014, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Sahnan, 2016, *Hukum Agraria Indonesia*, Setara Press, Malang.
- Salman S.O.R.H, 2008, Beberapa Aspek Filsafat Hukum dalam Penegakan Hukum melalui Penemuan Hukum di Indonesia, dalam Komar Kantaatmadja, *Refleksi Dinamika Hukum: Rangkaian pemikiran dalam Dekade Terakhir*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta.
- Santoso, U, 2005, *Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2013, *Hukum Agraria*, Kencana, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2014, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta.
- Simarmata, R, 2002, *Kapitalisme Perkebunan dan Konsep Kepemilikan Tanah oleh Negara*, Insist Press, Jakarta.
- Soekanto, S 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soimin, 2010, *Pembentukan Perundang-undangan Negara Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Soeprato. I.F.M 2007, *Ilmu Perundang-Undangan I*, Kanisius, Yogyakarta.
- Soetikno, I, 1987, *Proses Terjadinya UUPA: Peran Serta Seksi Agraria Universitas Gadjah Mada*, GMU Press, Yogyakarta.
- Sofwan, M,S.S, 1981, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Cetakan Ke-4, Liberty, Yogyakarta.
- Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.
- Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum Edisi Baru*, Cetakan Kelima, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sudjito, 1987, *Prona, Pensertipikatan Tanah Secara Massal dan Penyelesaian Sengketa Tanah yang Bersifat Strategis*, Liberty, Yogyakarta.
- Sumardjono, M.S.W., 2006, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Buku Kompas, Jakarta.
- Suseno, M.F, 1999, *Pemikiran Karl Marx*, Gramedia, Jakarta.
- Sutedi, A, 2009, *Tinjauan Hukum Pertanahan*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Syaukani, I dan Thohari, A.A, 2004, *Dasar-dasar Politik Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Tanya, L.B, Simanjuntak,N.Y, dan Hage, Y.M, 2010, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Tambunan,S.S.A, 2002, *Politik Hukum Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*, Puporis Publishers, Jakarta.

Tim Penyusun Kamus Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,Edisi III, Balai Pustaka, Jakarta.

Umar, H, 2004, *Metode Riset Ilmu Administrasi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Wahid, M, 2008, *Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah*, Republika, Jakarta.

Wahyudin, M dan Hufron, 2008, *Hukum, Politik dan Kepentingan*, Laksbang Presindo,Yogyakarta.

Wessels, B, 1986, *Burgerlijk Wetboek met Overgangswet Nieuw B.W.*, Koninklijke Vermande bv- Leylystad.Amsterdam.

Wiradi, G. 2009, *Reforma Agraria, Perjalanan yang Belum Berakhir*, Sajogyo Institute, KPA, dan AKATIGA, Bogor dan Bandung.

Vincent, J,R, 2001, *Human Rights and International Relations*, Cambridge University Press, Cambridge.

Yustika, E.A, 2012, *Ekonomi Kelembagaan: Paradigma, Teori, dan Kebijakan*, Erlangga. Jakarta.

Zarqoni, M.M, 2015, *Hak Atas Tanah (Perolehan, Asal dan Turunannya, serta Kaitannya dengan Jaminan Kepastian Hukum (Legal Guarantee) Maupun Perlindungan Hak Kepemilikannya (Property Right)*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

## **B. Disertasi/Tesis**

Hutagalung, A, “Pengembangan dan Pengelolaan Ruang Bawah Tanah dalam Aspek Hukum Tanah dan Lingkungan”, *Tesis Program Pascasarjana Fakultas Hukum*, Universitas.2007.

Indiraharti, S.N, 2016, *Konstruksi Perlindungan Hukum dalam Pemanfaatan Ruang Bawah Tanah yang Berkeadilan dan Berkepribadian Hukum*, *Ringkasan Disertasi*, Universitas Trisakti Jakarta.

Paulson, J, “3D Property Rights: An Analytical of Key Factors Based on International Experience in Real Estate Planning, Real Estate Planning and Land Law, Department of Real Estate and Construction Management *Disertasi*,

School of Architecture and the Built Environment, Royal Institute of Technology (KTH), Stockholm, Sweden, 2007

Putri, K.F, “Pemanfaatan Ruang Bawah Tanah dan Atas Tanah dalam Pelaksanaan Pembangunan Mass Rapid Transit Ditinjau dari segi Hukum Tanah Nasional”, *Tesis*, Universitas Indonesia, Jakarta. 2012.

Ramelan, E, “Prinsip-prinsip Pengaturan Ruang Bawah Tanah untuk Bangunan Gedung dalam Sistem Hukum Agraria Nasional”, *Disertasi*, Universitas Airlangga, Surabaya. 2006.

Wong, Y.S.D, *Tenure and Land Deaking in Malay States*, *Disertasi*, Singapore University, Singapore. 1977.

Zumbansen P, “Learning from the Law and Development Movements: How Present Research is Flawed and How it Can Improve”, *Dissertation of the Dickson Poon School of Law*, London. 2015.

### **C. Jurnal/Makalah**

Abbas, Y.M. “Public Private Partnership dalam Pembangunan dan Pengelolaan Suncity Plaza Sidoarjo (Model Perjanjian Build Operate Transfer (BOT) antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan PT Indraco)”, *e-jurnal*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, Surabaya. 2014.

Alrip, M, Patittingi, M dan Abdullah, F, “Pengaturan Penggunaan Ruang Bawah Tanah (Underground Space Utilization Settings)”, *e-jurnal*, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017.

Arisaputra, I.M, “Analisis Hukum Build, Operate, and Transfer pada Perjanjian (Bangun, Guna, Serah) pada Investasi PT Tosan Permai dalam Revitalisasi Lapangan Karebosi”, *Jurnal Penelitian Hukum*, Volume 1, Nomor 1, 2011.

Azizah, N.T, Soetijono, R.I., Indrayati, R, “Pemberian Izin Penggunaan Ruang Bawah Tanah dalam Proyek Mass Rapid Transit Jakarta”, *Jurnal Lentera Hukum*, Volume 5, Issue 2, 2018.

Bustomi, A, “Keberadaan Hukum Tanah Adat dalam Mewujudkan Tertib Hukum Agraria”, *Jurnal Solusi*, Volume 3, No. III, September 2013.

Cheryl W. Gray, W.C, “Reforming Legal System in Development and Transition Countries”, *Journal of Finance & Development*, September 1997.

Dauphinais, A.K, "Training a Countervailing Elite: The Necessity of an Effective Lawyering Skills Pedagogy for a Sustainable Rule of Law Revival in East Africa", *North Dakota Law Review*, Vol. 85:53, 2009.



Erlina, "Aspek Yuridis Atas Pendirian Bangunan di Ruang Bawah Tanah", *Jurnal Jurisprudentie*, Volume 5, Nomor 2, Juni 2018.

Hardiman, G, "Memfungsikan Ruang di Bawah Permukaan Tanah sebagai Alternatif untuk Menyelamatkan Ruang Terbuka di Pusat Kota Semarang, Disampaikan dalam Seminar Eco-Urban Design dalam Kerangka Pembangunan Perkotaan Perencanaan dan Perancangan Ruang/Lingkungan Terbangun (Built Environment) Perkotaan, PWK FT UNDIP pada tanggal 23 Oktober, 2008.

Hasanah, U, "Status Kepemilikan Tanah Hasil Konversi Hak Barat Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA Dihubungkan dengan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3, Nomor 1, 2018.

Harjono K.D, "Pengaruh Sistem Hukum Common Law terhadap Hukum Investasi dan Pembiayaan di Indonesia", *Lex Jurnalica*, Volume 6, Nomor 3, 2009.

Harsono, B, "Ketentuan Hukum Mengenai Eksekusi Hipotik dalam Rangka Pendaftaran Menurut: Overschrijvingsordonnantie 1834, Peraturan Pemerintah Nomor 10/1961 dan Undang-Undang Nomor 16/1985", Disampaikan pada Lokakarya Eksekusi Hipotik dan Kepastian Hukumnya, Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan Badan Penanahan Nasional, di Golden Ballroom Hillon Hotel Jakarta, tanggal 18 September 1990.

Hernawan, D, "Pengadaan Tanah dengan Cara Jual Beli oleh Instansi Pemerintah Menurut Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945", *Jurnal Litigasi*, Volume 16, Nomor 1, 2015.

Indiraharti, S.N, "Perlukah Asas Pemisahan Horisontal dalam Penggunaan Ruang Bawah Tanah?" *Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya*, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Bekerjasama dengan Pusat Studi Hukum Agraria - Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Oktober, 2017.

Leks,M.E, "Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan tentang Perumahan Rakyat", *Laporan Akhir Kementerian Perumahan Rakyat*, Pusat Perencanaan Pembangunan hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2013.

Kandou, K, "Tinjauan Yuridis Jaminan Hipotik Kapal Laut dan Akibat Hukumnya", *Lex Crimen*, Vol. V, No. 4, Apr-Jun 2016.

Kesuma, A.D, "Implementasi Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya", *Jurnal Lex Librum*, Vol. III, No. 7, Desember 2016.



- Mahsyar A, “Public Private Partnership: Kolaborasi Pemerintah dan Swasta dalam Pengelolaan Asset Publik di Kota Makassar”, *Jurnal Administrasi Publik*, Universitas Muhammadiyah Makassar, Volume 12, Nomor 1. 2015.
- Manan, B, “Politik Perundang-undangan dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisasi Ekonomi”, makalah disampaikan pada Seminar Nasional tentang Perseroan Terbatas, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 9 Maret 1996.
- Maramis, R.M, "Kajian Atas Perlindungan Hukum Hak Ulayat dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi Manado*, Tahun Vol.XXI, No.4, April-Juni 2013.
- Mitendra, M.H, "Fenomena dalam Kekosongan Hukum", *Jurnal Rechtsvinding*, Badan Pembinaan Hukum Nasional. Kementerian Hukum dan HAM RI. Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, Jakarta 26 April 2018.
- Nugroho, H, “Proyek Pembangunan MRT Jakarta”, *Dipresentasikan pada Seminar Pengenalan dan Dasar Teknik Terowongan, Direktorat Jembatan – Kementrian PU-Pera Republik Indonesia*, Jakarta, 19 November 2015.
- Nusantara G.H.A, "Politik Hukum Nasional", *Makalah Disampaikan pada Kerja Latihan Bantuan Hukum, LKBH Surabaya, September 1985*.
- Palmaya R.K, Wakidi, Ekwandari, S.Y, “Kebijakan Landrent pada Masa Penjajahan Inggris di Jawa Tahun 1811-1816,” *e-jurnal*, FKIP Unila Lampung, 2017.
- Pemerintah Kota Surabaya, “Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya Tentang Penyelenggaraan Jaringan Utilitas Tahun 2016”, *Naskah Akademik Pemerintah Kota Surabaya*, Surabaya, 2016.
- Poluan, R, “Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi Atas Tanah Hak Milik dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalur Mass Rapid Transit (MRT) di Lebak Bulus Jakarta Selatan”, *e-Jurnal*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016.
- Posner, A.R. “Creating a Legal Framework for Economic Development”, *The World Bank Research Observer*, Vol. 13, No. 1 February 1998
- Prasad, C,M, “Institutional Economics and Economic Development: The Theory of Property Rights, Economic Development, Good Governance and the Environment”, *International Journal of Social Economics*, Vol. 30, No. 6, 2003.
- Rahmahsari, A.N., “Implikasi Lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Status Hukum Pakualaman Ground di Kabupaten Kulon Progo”, *Lex Renaissance*, Volume 1, Nomor 2, 2016.

- Ramelan, E, 2005, “Hak Atas Penggunaan Ruang Bawah Tanah dalam Hukum Agraria Nasional”, *Yuridika*, Volume 11, Nomor 5, Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 381.
- Radhie, M.T, dalam *Majalah PRISMA*, No. 6 tahun keI-II, Desember 1973.
- Riyadi, S.B, “Law of Agrarian Conflict and Resolution Effort: A Claim Dispute of Eigendom Verponding Land”, *International Journal of Law*, Volume 3, Issue 3, May 2017.
- Riyadi, S.B, “Sociology of Law: An Agrarian Dispute Settlement”, *International Journal of Law*, Volume 3, Issue 3, May 2017..
- Ruslina, E, ”Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 9, Nomor 1, Maret 2012.
- Sadewa, W.Y dan Hafidz J,”Peran PPAT dalam Penyerahan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial oleh Pengembang Perumahan kepada Pemerintah Kota Semarang, *Jurnal Akta*, Volume 4, Nomor 2, Juni 2017.
- Santoso, U, “Eksistensi Hak Pengelolaan Dalam Hukum Tanah Nasional” *Mimbar Hukum* , Volume 24, Nomor 2, Juni 2012.
- Savigny, v.K.F, Khasanah, *Jurnal Ilmu Hukum Padjajaran* , Volume 2, Nomor 1, 2015.
- Sibuea, P.Y.H, “Tinjauan Yuridis Atas Pemanfaatan Ruang di Bawah Tanah”, *Jurnal Negara Hukum*, Volume 4, Nomor 1, Juni 2013.
- Sumardjono, M.S.W,“Redefinisi Hak Atas Tanah: Aspek Yuridis dan Politis Pemberian Hak di Bawah Tanah dan Ruang Udara”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Yogyakarta, 1991.
- Tedjonagoro, J.H, "Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum, Filsafat Hukum dan Falsafah Negara Republik Indonesia", *e-Jurnal*, Universitas Surabaya, Jawa Timur, 2018.
- Thontowi, J,“Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Adat dan Tantangannya dalam Hukum Indonesia”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 1, Vol. 20, Januari 2013.
- Titahelu,Z.R, “Penetapan Asas-asas Hukum Umum dalam Penggunaan Tanah Untuk Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat, Suatu Kajian Filsafati dan Teoritik tentang Pengaturan dan Penggunaan Tanah di Indonesia”, *Disertasi*, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 1993.

Trijono R, "Hak Menguasai Negara di Bidang Pertanahan", *Hasil Penelitian Badan Pembinaan Hukum Nasional*, Jakarta, 2015.

Utomo, S, "Nilai-Nilai Kearifan Lokal Hukum Adat dalam Hukum Tanah Nasional", *e-Jurnal Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti Pontianak*. 2018.

Zakie, M,"Konsepsi Hak Menguasai oleh Negara Atas Sumber Daya Agraria", *Jurnal Hukum*, Volume 12, Nomor 29, Mei 2005.

#### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Perubahan Keempat.

Ketetapan MPR RI No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Undang-Undang Pokok Agraria) (Lembaran Negara Nomor 104 Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (Lembaran Negara Nomor 42 Tahun 1996, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3632).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Nomor 134 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247).;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Nomor 132 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 132).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Nomor 65 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4722).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 Sebagaimana Diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Nomor 68 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Nomor 7 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188);

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Nomor 53 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerj (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Nomor 59 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Nomor 83 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Nomor 129 Tahun 2009).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Nomor 21 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5103).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28)
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21).
- Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pelaksanaan Ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria.
- Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2014 tentang Pedoman Penggunaan Ruang di Dalam Bumi.
- Surat Edaran Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 4/SE/I/2015 tentang Batasan Usia Dewasa dalam Rangka Pelayanan Pertanahan.

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan;

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 167 Tahun 2012 tentang Ruang Bawah Tanah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 162 Tahun 2012).

Peraturan Walikota Makassar Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembagian Ruang Peruntukan dan Larangan Penggunaan dalam Area Permukaan Lapangan Karebosi Kota Makassar.

Putusan Pengeadilan Negeri Makasar Nomor 246/PDT.G/2007/PN.MKS. Tanggal 09 Juni 2008.

Putusan Pengadilan Tinggi Makasar Nomor 325/PDT/2008/PT.MKS Tanggal 09 Januari 2009

Putusan Kasasi Nomor 366/K/PDT/2010. Tanggal 26 November 2010.

#### **E. Internet**

Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, "Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi DKI Jakarta", <https://jakarta.bps.go.id/>, diakses pada tanggal 10 September 2019.

Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, "Statistik Transportasi DKI Jakarta Tahun 2018", <https://jakarta.bps.go.id/>, diakses pada tanggal 10 September 2019.

Opoulou. A, "*Public property and property rights theory*," diakses dari [www.lse.ac.uk/europeanInstitute/research/hellenicObservatory/pdf/4th\\_%20Symposium/PAPERS\\_PPS/LAW\\_CITIZENSHIP](http://www.lse.ac.uk/europeanInstitute/research/hellenicObservatory/pdf/4th_%20Symposium/PAPERS_PPS/LAW_CITIZENSHIP) pada tanggal 21 Oktober 2017.